



SALIYO

## Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Psikologi Politik

**ABSTRAKSI:** Memahami politik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman ideologi. Setiap partai politik di negara manapun memiliki ideologi tertentu. Partai politik berkiprah dan berperan dalam suatu negara akan selalu berpijak pada ideologi yang dianutnya. Begitu juga dalam mengkaji politik dalam perspektif psikologi politik. Setiap perilaku politik, pada galibnya, tidak akan menyimpang dari garis ideologi partai yang dianutnya. Makalah ini ditulis untuk mengetahui penjelasan politik Islam dalam perspektif psikologi politik. Makalah ini merupakan hasil reviu dari berbagai sumber bacaan, baik buku ataupun jurnal ilmiah. Penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa di antara pemikiran Islam dan politik, yang dikemukakan oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah, pemikiran tersebut banyak dipahami dan menjadi pegangan umat Islam yang bermahzab Sunni. Walaupun demikian, perilaku politik yang dilakukan oleh seseorang, baik individu ataupun kelompok, pada umumnya selalu dikaitkan dengan teori S-R atau Stimulus – Respons dari aliran behaviorisme. Pada sisi lain, sumber-sumber perilaku orang tersebut secara individu dan kelompok berakar pada ideologi, sikap, dan nilai yang dianutnya. Dalam konteks ini, hubungan Islam dan politik dapat dijelaskan, baik melalui ilmu politik maupun psikologi politik, dalam perspektif Islam. Hal itu karena politik Islam dapat berintegrasi dengan psikologi politik. Akhirnya, untuk mengurangi pemahaman-pemahaman politik garis keras, ataupun radikalisme dalam Islam, maka ilmu psikologi politik dapat digunakan untuk menyelesaikan problema sosial dan politik tersebut.

**KATA KUNCI:** Islam dan Politik; Psikologi Politik; Ideologi, Sikap dan Nilai; Umat Islam; Problema Sosial dan Politik.

**ABSTRACT:** "Islam and Power in the Perspective of Political Psychology". Understanding politics cannot be separated from the understanding of ideology. Any political party in any country has a particular ideology. Political parties take part and play a role in a country will always stand on the ideology that its embraces. So also in the study of politics in the perspective of political psychology. Any political behavior, on the other hand, will not deviate from the ideological line of the party that its embraces. This paper was written to know the explanation of Islamic politics in the perspective of political psychology. This paper is the result of reviews from various sources of reading, whether books or scientific journals. Writing this paper using qualitative methods with the source of library data. The results of the study show that among Islamic and political thought, proposed by Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam al-Ghazali, and Ibn Taymiyya, these ideas are widely understood and become the guidance of Muslims with Sunni' school of thought. Nevertheless, the political behavior undertaken by a person, whether individual or group, is generally always associated with S-R or Stimulus – Response theory from the behaviorism school of thought. On the other hand, the individual and group's behavioral sources are rooted in his/her ideology, attitudes, and values. In this context, Islamic and political relations can be explained, both through political science and political psychology, in the Islamic perspectives. That's because Islamic politics can be integrated with political psychology. Finally, to reduce the hard-line political insights, or radicalism in Islam, the science of political psychology can be used to solve the social and political problems.

**KEY WORD:** Islam and Politics; Political Psychology; Ideology, Attitude and Value; Muslims; Social and Political Problems.

**About the Author:** Dr. Saliyo adalah Dosen di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kudus, Jalan Conge Ngembalrejo, Kudus 59322, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [saliyo41876@gmail.com](mailto:saliyo41876@gmail.com)

**Suggested Citation:** Saliyo. (2017). "Islam dan Kekuasaan dalam Perspektif Psikologi Politik" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 2(2), August, pp.137-156. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 2443-1776.

**Article Timeline:** Accepted (February 20, 2017); Revised (May 30, 2017); and Published (August 30, 2017).

## PENDAHULUAN

Memahami politik tidak dapat dilepaskan juga dari pemahaman ideologi. Setiap partai politik di negara manapun memiliki ideologi tertentu. Ideologi merupakan dasar dalam setiap partai politik. Partai politik berkiprah dan berperan dalam suatu negara akan selalu berpijak pada ideologi yang dianutnya (Budiardjo, 1989:159). Begitu juga dalam mengkaji politik dalam perspektif psikologi politik. Setiap perilaku politik, pada galibnya, tidak akan menyimpang dari garis ideologi partai yang dianutnya. Dalam konteks yang demikian, memahami ideologi politik dalam psikologi politik juga merupakan sesuatu hal yang penting (Budiardjo, 1989; dan Adams, 2004).

Membicarakan ideologi dalam ilmu sosial dikenal sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami. Makna negatif yang diberikan oleh para praktisi politik lebih banyak memberikan makna secara semantik (Sudibyo, 2001; dan Varma, 2001). Makna ideologi tersebut juga lebih banyak pelacuran makna daripada makna yang proposional. Pada sisi lain, banyak sarjana yang memberikan definisi tentang ideologi secara berlebihan, yang mereka tulis dalam beberapa literatur, baik buku ataupun jurnal (*cf* Moten, 1996; Adams, 2004; Jost, Federico & Napier, 2009; dan Mantri, 2012). Tujuannya adalah untuk membedakan makna-makna palsu yang diberikan oleh banyak orang.

Sementara itu, pada ruang-ruang yang berharga ataupun kesempatan yang mulia dalam membicarakan ideologi tidaklah sia-sia. Dalam mendiskusikan ataupun mencoba menuliskan tinta untuk mengkaji tentang ideologi, baik para sarjana ataupun praktisi, bukanlah

dengan cara yang mencoba-coba tapi harus dilakukan secara sistematis dan akademis (Jost, Federico & Napier, 2009).

Uraian ideologi memiliki makna semantik, dan sebagai pelacuran makna tidaklah terabaikan. Hal yang demikian karena banyak para politisi yang berpindah-pindah dalam berkiprah di partai politik, ketika para pelaku politik tersebut menemui permasalahan pada partai politik yang diikutinya. Para politisi dalam berkiprah, dengan konteks demikian, sebagian besar banyak memiliki kepentingan pragmatis. Seorang praktisi politik jarang yang memiliki ideologi partai, sebagai ideologi mati dalam hidupnya. Namun demikian, tetap ada praktisi politik yang memiliki ideologi partai, sampai mengakar dalam hidup dan matinya (Houghton, 2009; dan Ahmad ed., 2010).

Ideologi, secara umum, dalam ilmu psikologi dipahami sebagai sesuatu yang bersumber secara internal terpadu, yang ada pada diri seseorang dan berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan pilihan seseorang ketika hidup dalam masyarakat untuk berorganisasi (Houghton, 2009). Dalam ilmu psikologi, ideologi secara esensi merupakan dua dimensi yang dimiliki oleh individu. *Pertama*, ideologi merupakan sarana untuk meligitimasi dan mengakui versus menolak dan melawan terhadap adanya perubahan. *Kedua*, ideologi juga bisa menerima versus menolak terhadap ketidakadilan (Stone *et al.*, 2014).

Polarisasi makna ideologi memang sesuatu hal yang aneh. Walaupun demikian, makna ideologi didalam tradisi demokrasi di Amerika Serikat cukup menjadi perhatian (Stone & Menhell, 2005). Pada sisi lain, tidaklah sesuatu yang bisa dikatakan istimewa

ketika ada pertarungan kampanye antara seseorang, baik berhaluan ideologi konservatif maupun liberal, yang membicarakan tentang kekayaan dan keadilan pada masyarakat, hukum dan penyimpangannya, serta kebebasan penduduk. Hal yang membedakan antara seseorang yang menganut ideologi konservatif dengan ideologi liberal hanyalah pandangan politik pada suatu problema yang dihadapi pemerintah yang berkuasa, serta nilai-nilai yang diyakininya (Kahan, 2013).

Ideologi merupakan sistem dari sebuah sikap dan nilai, yang terorganisir dan bersifat abstrak (Adams, 2004). Dalam psikologi politik dibahas tentang bentuk ideologi. Di antara bentuk ideologi adalah konservatif dan liberal. Ideologi konservatif dibangun berdasarkan hipotesis bahwa nilai dan sikap untuk mempromosikan tentang kebebasan atau hak warga dan setiap orang memiliki hak, baik untuk kemajuan ataupun peningkatan hidup. Manakala ideologi liberal dibangun berdasarkan hipotesis bahwa setiap warga memiliki nilai dan sikap untuk maju dan berbuat kebajikan dengan berpijak pada kebenaran yang universal (Adams, 2004; dan Mantri, 2012).

Jika kedua bangunan hipotesis tersebut benar, maka masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk menganut dan memilih dalam bersikap. Apakah masyarakat akan memilih sikap dengan ideologi liberal ataupun ideologi konservatif, atau bahkan tidak keduanya. Jawabannya adalah apakah ideologi tersebut mengakar dan menjiwai pada banyak orang, atau hanya sebagai kerangka pragmatis (Maio *et al.*, 2003).

Untuk mengetahui ideologi-ideologi tersebut, yaitu ideologi konservatif dan

ideologi liberal, keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Ideologi konservatif dalam ilmu politik digambarkan sebagai ideologi yang memiliki haluan sayap kanan. Sebaliknya, ideologi liberal dalam ilmu politik digambarkan sebagai ideologi yang berhaluan sayap kiri (Adams, 2004; dan Oktaviana, 2016). Kondisi yang demikian, bagi setiap individu diperbolehkan untuk berbeda ideologi. Biasanya, pandangan satu kelompok atau kelompok yang lain berbeda dalam pandangan ideologi, karena berkaitan dengan posisi dalam kedudukan, baik jabatan dalam partai ataupun pemerintahan (Trust, 2012).

Ada pandangan yang menarik dari ideologi konservatif. Pandangan tersebut adalah bahwa seseorang yang berperilaku politik dengan mengambil pegangan pada ideologi konservatif, ia memiliki pandangan bahwa ideologi tersebut merupakan sistem keyakinan yang konsisten berpegang pada dua komponen. Kedua komponen tersebut adalah perlawanan untuk perubahan dan oposisi untuk keadilan. Pada sisi lain, ideologi konservatif juga mengurangi janji-janji yang tidak pasti, termasuk mengurangi pada komunikasi-komunikasi yang mengandung ancaman (Adams, 2004).

Bagi seseorang yang menganut ideologi konservatif, ia memiliki argumen yang luas secara psikologi, yaitu ada perbedaan antara ideologi haluan kanan dan kiri. Pada sisi lain, bagi ideologi konservatif adalah bahwa stabilitas pemerintah secara hierarki akan memberikan ketenangan dan ketentraman pada rakyat dan pemegang kekuasaan. Walaupun demikian, tuntutan perubahan dan keadilan masyarakat terkadang tidak dapat

diprediksikan. Namun, dalam pandangan yang sedang memegang kekuasaan, ianya menginginkan adanya kelanggengan kekuasaan (Jost *et al.*, 2007).

Mengkaji lebih dalam lagi tentang ideologi dalam politik, maka perlu mengetahui definisi yang simpel, umum, dan tidak kontroversial. Politik didefinisikan sebagai keyakinan pada suatu masyarakat yang tepat dan pantas agar dapat berprestasi dan berperan dalam suatu kelompok masyarakat (Budiardjo, 1989; dan Varma, 2001). Ideologi juga dapat diterjemahkan sebagai model mental kerangka kerja seseorang dalam menterjemahkan lingkungan sosial untuk mengaturnya dalam kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 1989; dan Mantri, 2012). Apabila pemahaman ideologi tersebut dapat diterima, maka ideologi dapat dijadikan sebagai alat untuk menginterpretasikan lingkungan sosial secara normatif dan spesifik, sebagai kebutuhan dari eksistensi dan motivasi manusia.

Secara spesifik, namun lebih melebar, bahwa ideologi dapat dipahami sebagai kristalisasi komunikasi yang lebih luas, yang berisikan keyakinan, opini, nilai, dan identifikasi kelompok, ataupun kelas kehidupan dalam masyarakat. Ideologi juga dapat dipahami sebagai usaha atau gambaran untuk menginterpretasikan kehidupan manusia secara alami, sejarah kehidupannya, bahkan kehidupan dalam realitas, serta kemungkinan-kemungkinan kehidupan secara ekonomi dan politik yang ideal (Jost, Federico & Napier, 2009).

Memahami ideologi juga berkaitan dengan sikap dan nilai. Tiga hal tersebut saling pengaruh dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam setiap pribadi manusia. Tiga hal tersebut

juga dapat digambarkan sebagai hal yang mendasar dari kondisi kepribadian manusia. Ideologi, nilai, dan sikap dapat digambarkan dalam pemahaman yang sederhana dengan rasa, keyakinan, dan perilaku pada waktu yang lampau. Masyarakat dapat mengevaluasi fakta-fakta dari ideologi, sikap, dan nilai (Adams, 2004; dan Maio *et al.*, 2003).

Fakta-fakta tersebut dapat masuk dalam kategori positif ataupun negatif. Fakta-fakta tersebut juga dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan seseorang pada sesuatu yang belum tercapai pada masa lampau. Gambaran tersebut dapat dicontohkan, seperti seseorang yang memiliki nilai keadilan karena orang tersebut berkeyakinan bahwa keadilan digunakan di masyarakat. Perasaan itu akan berubah apabila ada perlakuan diskriminasi, maka perilaku tersebut tidak adil. Hal tersebut termasuk pada sesuatu yang tidak adil. Tiga elemen tersebut, yaitu ideologi, nilai, dan sikap, merupakan satu formasi yang saling mempengaruhi pada manusia (Maio *et al.*, 2003).

Dari ulasan di atas dapat dikatakan bahwa setiap partai memiliki ideologi sebagai karakter. Sama halnya orang yang berkiprah pada partai tersebut, juga harus seiring dengan ideologi partai. Ideologi dalam partai merupakan dasar untuk berjuang dalam pemerintah menuju kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, banyak para pelaku politik dalam berpartai hanya kepentingan pragmatis saja. Ketika ada konflik dalam partai tersebut, dan mengalami kekalahan, bisa jadi orang-orang tersebut sebagai kutu loncat politik. Dalam psikologi politik, hal yang demikian dinamakan “pelacuran ideologi” (Haryono, 2010; Akbar, 2011; dan Mantri, 2012).



## METODE

Artikel ini merupakan hasil kajian dari penelitian kualitatif yang bersumber dari pustaka, baik berupa jurnal ilmiah ataupun buku, yang berkaitan dengan permasalahan tema (Zed, 2004; Creswell, 2007; Rahmat, 2012; Mulyana, 2013; dan Neuman, 2013). Kerja peneliti, yang pertama, adalah mengumpulkan sumber yang terkait. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dan mengumpulkan data untuk menulis dalam bentuk deskriptif-analitik. Langkah-langkah analisis dalam artikel ini dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

Tahap pertama adalah melalui mengenal data dengan cara revidi bacaan, mendengarkan, dan membaca. Tahap kedua adalah melalui transkrip data yang dibaca atau revidi dengan cara mengutip. Tahap ketiga adalah melakukan pengaturan secara sistematis, dengan menyusun indeks tema dan mengidentifikasi data tersebut. Tahap keempat adalah sensitif data dari peneliti untuk mengkatagorikan data yang penting dan tidak penting dalam mendekripsikannya (Zed, 2004; Lacey & Luff, 2009; dan Creswell, 2007).

Menurut Jujun S. Suriasumantri (2005), sebagaimana juga dikutip oleh Saliyo (2015), pola pikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah berdasarkan pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif menyajikan penalaran dari fakta yang umum ke khusus. Sebaliknya, pola pikir induktif dalam penyajiannya adalah dari fakta khusus menuju yang umum (Suriasumantri, 2005; dan Saliyo, 2015).

Artikel ini, dengan demikian, mencoba menganalisis lebih jauh tentang Islam dan kekuasaan dalam perspektif psikologi

politik, dengan menekankan pembahasan pada masalah-masalah: (1) Agama; (2) Islam dan Politik; serta (3) Psikologi Politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Pertama, Masalah Agama.* Dalam analisis politik, sistem keyakinan dan ideologi merupakan dua hal yang saling berkaitan (Budiardjo, 1989; Varma, 2001; dan Adams, 2004). Ada beberapa istilah sering dipakai dalam membicarakan tentang keyakinan. Istilah tersebut, diantaranya, adalah: *belief and disbelief system*, yang digunakan oleh Milton Rokeach (1951); *attitude*, yang digunakan oleh Gordon Allport (1961); *analysis*, yang digunakan oleh Robert A. Dahl (1984); *belief system*, yang digunakan oleh Philip E. Converse (2006); serta *character*, yang digunakan oleh Alex Inkeles (1965), Erich Fromm (1982), dan Stephen C. Levinson (1983). Istilah yang lain juga adalah seperti: *doctrine*, yang digunakan oleh Michael Oakeshott (1939); *dogma*, yang digunakan oleh Milton Rokeach (1968); *culture*, yang digunakan oleh David Easton (1965) dan Gabriel A. Almond (1993); serta *ideology*, yang digunakan oleh Karl Mannheim (1991), W. Theodor Adorno (1991), dan Max Lane (2007).

Ada yang berpendapat bahwa dimensi-dimensi dari prinsip-prinsip politik itu merupakan sesuatu hal yang sulit, atau isu-isu kebijakan dari hal yang sangat kecil yang terjadi pada pelaku politik itu sendiri, ataupun nilai-nilai sosial walaupun dalam bentuk yang sangat kecil. Sebagai jawaban dari hal tersebut, maka bagaimana seorang pelaku politik berpikir bagi dirinya dalam masyarakat. Ada dua hal yang penting diperhatikan dalam analisis ideologi politik, yaitu: identitas orang tersebut dan

kemanusiaannya secara universal (Lane, 1973; dan Lane, 2007).

Tidak dapat dibantah lagi bahwa agama, dalam hal ini, memiliki keterkaitan dengan politik. Yang lebih aktual adalah bahwa agama sangat berperan dalam politik, dan hal ini diperdebatkan dalam waktu yang panjang (Ahmad ed., 1986; dan Abdurrahman, 2004). Permasalahan yang cukup pelik adalah bahwa agama tidak dapat membuat baik atau buruk manusia. Berbeda lagi dengan di Nigeria, misalnya, dimana agama mampu berperan dalam pengentasan kemiskinan, buta huruf, dan pendidikan politik. Hal yang demikian menangkal anggapan bahwa politik hanyalah pekerjaan yang kotor. Pekerjaan tersebut adalah usaha orang yang suka menipu, dan mengumpulkan pihak lain untuk mendukung atau berpartisipasi dalam politiknya. Kasus yang demikian justru berbeda dengan yang ada di Nigeria, bahwa kestabilan negara tersebut karena harmoninya antara agama dengan politik (Afolabi, 2015).

Banyak negara di dunia yang memiliki pandangan bahwa tradisi agama bersekutu dengan etnik, serta pandangan politik secara nasional (Zahrah, 1996; dan Adams, 2004). Agama menjadi salah satu legitimasi yang digunakan dalam pergerakan politik, bahkan menjadi identitas politik. Kecenderungan agama dijadikan kekuatan dalam Perang Dingin (1950-1990), misalnya, melalui tekanan-tekanan dalam proses globalisasi yang menyertainya kemudian. Sebagai hasil dari kerja observasi, para peneliti dan pengamat berkomentar bahwa perbedaan agama dapat menyebabkan tekanan antar masyarakat yang memiliki akar untuk berkonflik dan berselisih antar sipil. Menurut pandangan tersebut

bahwa agama merupakan sumber problematika dalam arena politik yang sangat menentukan. Keadaan demikian memaksa individu atau kelompok dalam membicarakan tentang agama harus dijaga dengan sebaik-baiknya (Azra, 1996; Zahrah, 1996; dan Adams, 2004).

Samuel P. Huntington (1996), seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat, memberikan pandangan dalam teori politiknya bahwa konflik ideologi dapat dilihat dari dua blok kekuatan, yaitu Perang Dingin diantara kedua kekuatan, yang menekankan pada perselisihan peradaban dikarenakan perbedaan agama (Huntington, 1996). Teori tersebut dipresentasikan pada tahun 1993 dalam bentuk esai. Tiga tahun kemudian, permasalahan tersebut menjadi bahan diskusi dalam buku yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996). Buku tersebut menjadi bahan acuan dan ramalan untuk meninjau kembali pemenuhan diri pada peristiwa 11 September 2001, serta proklamasi untuk melakukan perang dan teror di seluruh dunia (*cf* Huntington, 1996; Esposito, 1996; dan Fitria, 2009).

Kejadian tersebut, kemudian, direspon oleh Presiden Republik Islam Iran, Sayid Mohamad Khatami, bahwa tahun 2001 merupakan tahun dialog antar peradaban (Hanvitra, 2015). Pendapat tersebut juga didukung oleh seorang teolog, Hans Kung (2000), yang memiliki pendirian agama yang kuat. Dia berpendapat bahwa tidak akan ada perdamaian selama tidak ada kerukunan agama pada suatu bangsa (*cf* Kung, 2000; Arifin, 2012; dan Raiser, 2013).

Dalam setiap bangsa pasti ada agama. Setiap masyarakat juga mempunyai rasa memiliki dalam kehidupan suatu

kelompok untuk merespon setiap keadaan. Menurut H. Tajfel & J.C. Turner (1986), dalam keadaan yang demikian maka masyarakat, dalam merespon keadaan yang ada, salah satu yang digunakan adalah agama. Hal yang demikian dapat dijelaskan dengan *social identity theory*. Artinya bahwa agama memiliki hubungan antara konsep diri yang dimiliki oleh seseorang dengan konsep yang dimiliki dalam kelompoknya. Identifikasi diri dalam suatu kelompok merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kebahagiaan psikologis. Identifikasi kelompok yang memiliki kesamaan identitas dapat saling memiliki, bahkan saling mendukung, ketika menghadapi suatu permasalahan (Tajfel & Turner, 1986; dan Gazi, 2013).

Konsep identitas diri telah menjadi landasan teori dalam banyak penelitian. Kajian identitas diri, dalam perspektif sosial, dapat meningkatkan kepercayaan diri ataupun kebahagiaan psikologis orang tersebut, baik dalam diri orang tersebut sebagai anggota kelompok ataupun di luar anggota kelompok. Identitas diri juga dapat menjadikan dukungan dari kelompoknya, ketika seseorang memiliki problema kehidupan ataupun dapat meningkatkan taraf status sosialnya. Pengetahuan dan nilai-nilai sosial anggota kelompok terintegrasi dalam individu sebagai identitas diri. Selanjutnya, identifikasi sosial akan nampak pada sisi kognitif, afektif, dan dimensi evaluasi. Hal yang demikian menunjukkan bahwa identifikasi sosial dapat menterjemahkan pentingnya konsep diri, yang dimiliki oleh seseorang dalam kelompoknya (Ysseldyk, Matheson & Anisman, 2010).

Di Amerika Serikat, para sarjana telah memperdebatkan tentang pengaruh ketertarikan seseorang pada kelompok.

Menurut Thomas W. Lee *et al.* (1992), ketertarikan organisasi pada suatu kelompok sangat berpengaruh besar dalam suatu pemerintahan. Demikian juga bahwa seseorang yang tertarik pada kelompok akan meningkatkan ketertarikannya pada ruang publik yang bersifat umum (Lee *et al.*, 1992).

Dengan demikian, politik berpengaruh besar terhadap ketertarikan pada suatu kelompok yang sudah menetap. Keadaan yang demikian telah menjadi tema penelitian di Washington DC (District of Columbia), bahwa lobi-lobi antar para pelaku politik pada level yang tinggi terjadi pada individu yang memiliki komitmen pada kelompoknya. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dalam teori psikologi sosial, yang menyatakan bahwa perilaku manusia terarah dengan dukungan individu-individu dalam kelompoknya (Miller, Simunons & Hildreth, 1986:1; dan Maio *et al.*, 2003).

Sangat jelas bahwa agama telah menjadi salah satu pandangan politik di abad ke-21 ini. Banyak hal yang telah lahir kembali, bahwa agama menjadi salah satu pandangan dalam politik di dunia. Di era modern, agama menjadi salah satu pemicu kekuatan politik di dunia. Pada sisi lain, agama juga tidak hanya menjadi kekuatan politik di dunia, namun agama telah menjadi kepribadian seseorang yang diperhitungkan dalam politik (Ahmad ed., 1986; Meyer, 2007; Ahmad ed., 2010; dan Raiser, 2013).

Ada lima peristiwa di dunia yang telah menjadi perhatian. Lima peristiwa tersebut berkaitan dengan agama dan politik. *Pertama*, sistem pemerintahan teokrasi yang modern di Iran, dengan Islam fundemantalis yang dipimpin oleh Ayatullah Rohullah Khomaeni

pada tahun 1979. Agama pada masa kepemimpinannya tidak hanya menjadi kemajuan dalam negaranya, tetapi agama telah menjadi kekuatan dan kesuksesan dalam politik di dunia (Afala, Tamar & Murfi, 2009).

*Kedua*, pengeboman gedung WTC (*World Trade Centre*) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 11 September 2001, yang merupakan perlawanan politik teroris dari orang-orang Islam fanatik di era global (Anggoro, 2007). *Ketiga*, baik para peneliti maupun pengamat banyak yang berpendapat bahwa agama menjadi salah satu kekuatan politik di era globalisasi (Raiser, 2013). *Keempat*, banyak negara di dunia, khususnya di Eropa, yang memusuhi kehidupan pemeluk agama. Mereka tidak tinggal diam di situ saja, tetapi juga mempersulit aktivitas agama pada ruang publik (Esposito, 1996). *Kelima*, adanya isolasi dan kekerasan terhadap pemeluk agama bagi para migran di beberapa negara di Eropa (Meyer, 2007).

Semua negara di dunia menganggap bahwa agama memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari setiap orang. Sebagai warga negara, agama juga berperan sangat penting bagi setiap warganya dan bagi setiap orang dalam berinteraksi antar yang satu dengan yang lain. Di antara interaksi tersebut adalah dalam memilih makanan, menentukan tempat tinggal, dan pilihan dalam kompetisi politik. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, agama sangat berperan sekali bagi setiap pemeluknya. Dengan kata lain bahwa agama dengan politik saling menjalin dan saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Begitu juga agama berkaitan dengan pilihan ideologi dalam politik (Moten, 1996; dan Afolabi, 2015).

Dalam konteks ini, agama merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan begitu saja di Nigeria. Agama merupakan faktor yang menentukan dalam diskursus politik. Di Nigeria, agama tidak hanya berperan dalam politik saja, tetapi juga berperan dalam bidang ekonomi, pendidikan, relasi sosial, dan psikologi masyarakat. Di Nigeria, ada tiga agama yang dominan, yaitu Islam, Kristen, dan agama tradisional Afrika. Ketiga agama tersebut membolehkan para pemeluknya untuk terlibat dalam politik di Nigeria (Afolabi, 2015).

Agama tradisional yang ada di Nigeria merupakan refleksi yang sistemik dari budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Agama tradisional juga bercerita tentang sejarah kekuatan-kekuatan alam yang ada di bumi Nigeria. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan tersebut dimiliki oleh masyarakat dan dianggapnya sebagai Tuhan. Dalam kepercayaan tradisional, berpolitik yang mereka miliki telah menguat dengan sistem politik teokrasi. Mereka percaya pada *Yakuba Oba*, yang merupakan raja dan pemimpin masyarakat. *Oludumare* merupakan panglima tertinggi, menurut mereka. Sebelumnya, ada juga *Uba* yang telah terpilih sebelum menjadi panglima. Manakala *Ifa* merupakan sosok yang menjadi konsultan spiritual (Afolabi, 2015).

Islam juga merupakan agama yang menjadi panutan dalam bernegara bagi pemeluknya di Nigeria. Pemeluk agama Islam menginterpretasikan *Al-Qur'an* sebagai dasar untuk berpolitik. Tidak hanya itu saja, *Al-Qur'an* juga menjadi dasar dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain, ataupun dalam kegiatan ekonomi. Agama Islam telah memberikan contoh bahwa Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*) merupakan



pemimpin umat sepanjang hidupnya (Haikal, 1972).

Sementara itu, pada sisi yang lain, pemeluk agama Kristen di Nigeria juga banyak yang terlibat dalam politik. Di antara pemeluk agama Kristen, ada yang menjadi Senator, Gubernur, dan menjadi orang terhormat lainnya di Nigeria (Afolabi, 2015).

Uraian di atas dapat dipahami bahwa agama merupakan ideologi seseorang dalam berperilaku dan berinteraksi dengan komunitasnya di masyarakat. Agama merupakan dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Hal demikian merupakan pemahaman agama yang toleran, kukuh, atau bahkan militan yang dapat menjadi kekuatan bagi orang tersebut dalam setiap langkah. Namun terkadang juga disayangkan, ada sekelompok orang yang memahami agama dengan perspektif benarnya sendiri. Keadaan yang demikian dapat menjadikan sumber konflik, kekerasan, perilaku kriminal, dan lain sebagainya (Hiro, 1989).

Agama memang bersifat absolut, namun pemahaman agama bersifat relatif. Apabila agama dijadikan ideologi rasional, ataupun pegangan yang toleran, maka kehidupan dunia dalam bentuk apapun, seperti politik dan ekonomi, akan selalu berdasarkan pada standar moral yang ada, dan jauh dari sikap-sikap ekstrim lainnya (Hiro, 1989; dan Black, 2006).

**Kedua, Masalah Islam dan Politik.** Menurut Antony Black (2006), pemikiran politik Islam sudah ada sejak Islam lahir di dunia secara komprehensif dan otoritatif hingga sekarang. Pemikiran politik Islam juga dapat diakses sebagai referensi untuk memahami konstelasi politik di seluruh negara, baik yang bersifat dunia ataupun akhirat (Black, 2006).

Lebih dari 400 jurnal yang membahas tentang tema-tema Islam dan politik. Tema-tema tersebut, di antaranya, berkaitan dengan kepribadian, pergerakan, sejarah, dan lain sebagainya. Tulisan lain dalam politik Islam juga berkaitan dengan tema-tema, seperti: kepemimpinan Nabi Muhamad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), otoritas, gender, jihad, pluralisme, fundamentalisme, dan minoritas. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa forum-forum diskusi antara sarjana sangat diperlukan untuk memperbanyak pembahasan dan kajian tentang pertemuan antara Islam dan politik (Crone *et al.*, n.y.; Afala, Tamar & Murfi, 2009; dan Liew, 2012).

Islam membutuhkan komitmen tidak hanya pada dimensi spiritual, tapi Islam juga membutuhkan komitmen kerja dalam tatanan pemerintahan yang tidak berseberangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* (Madjid ed., 1985). Untuk mewujudkan tujuan ini, umat Islam semestinya memahami tentang kepemimpinan dalam politik. Keadaan yang demikian, menjadikan umat Islam perlu mengenal kembali pengetahuan ilmu politik yang bersinergi dengan Islam (Ahmad ed., 1986; Ayubi, 1991; dan Raiser, 2013).

Istilah "politik Islam" sudah mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Guilain Denoeux (2002) menggambarkan adanya politik Islam, yang merupakan kebangkitan pergerakan ideologi yang disandarkan pada agama Islam (Denoeux, 2002). Politik Islam diambil dari simbol-simbol dan tradisi-tradisi Islam, yang terartikulasi dalam agenda politik Islam.

Menurut Nasih N. Ayubi (1991), politik Islam merupakan doktrin ataupun pergerakan yang berdasarkan pada ajaran

agama Islam dalam mengelola kekuasaan atau negara (Ayubi, 1991). Manakala Robert W. Hefner (2000), sebagaimana juga dikutip oleh Dian Yanuardy (2003), menggambarkan bahwa politik Islam merupakan kebangkitan para ulama, atau orang sholeh, dalam kegiatan agama di wilayah umum, yang sebelumnya tidak ada dalam sejarah modern di dunia Islam, sejak tahun 1970-an dan 1980-an (Hefner, 2000; dan Yanuardy, 2003). Pada dekade tersebut tidak ada kegiatan yang menekankan pada perbedaan komitmen dalam pergerakan Islam, ekspresi ulama lama atau tradisional Islam di wilayah publik, dan sebagai identitas politik (Hurd, 2007).

Kelahiran dan perkembangan politik Islam merupakan produk dari pemikiran manusia dan aksinya sebagai Muslim. Masyarakat Madinah pada abad ke-7 M (Masehi) merupakan komunitas Muslim yang pertama. Masyarakat tersebut melahirkan sosok Muhamad SAW sebagai Nabi. Nabi Muhamad SAW melahirkan konsep *umah* pada periode Klasik, karena adanya interaksi sosial dan politik pengikutnya di Madinah. Ditetapkannya masyarakat Madinah sebagai *umah* Islam oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hal yang formal dan legal. Pada sisi lain, adanya masyarakat Madinah sebagai *umah* Muslim merupakan prestasi Muhammad sebagai Nabi dalam menyebarkan ajarannya dan membentuk negara yang berlandaskan pada ajaran Islam (Haikal, 1972; dan Thaib, 2012).

Untuk mengenang tentang hubungan Islam dengan politik yang ada dalam sejarah Islam, kita dapat membaca dalam catatan sejarah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 632 M. Pada saat itu, umat Islam berpikir

tentang siapa yang akan menjadi penerus memimpin dakwah Islamiyah setelah Baginda Nabi meninggal dunia? Ada perdebatan antara kaum *Ansor* (penolong yang merupakan penduduk Madinah) dengan kaum *Muhajirin* (orang-orang yang Hijrah dari Mekkah) untuk meneruskan kepemimpinan dalam Islam (Haikal, 1972; dan Black, 2006).

Kaum *Muhajirin* menghendaki agar orang Mekah yang menjadi penerus; sebaliknya, kaum *Ansor* menghendaki agar orang Madinah yang menjadi pemimpin. Perdebatan tersebut diselesaikan oleh Umar bin Khatab dan Abu Bakar as-Shidik, maka terpilihlah Abu Bakar as-Shidik sebagai pemimpin atau *khalifah* yang pertama, sebagai penerus dakwah Islamiyah setelah Nabi Muhammad SAW wafat (Haikal, 1972; as-Suyuthi, 2005; dan Saeed, 2006).

Robert W. Hefner (2000) dan Dominick Salvatore (2007) mengungkapkan bahwa hal yang terpenting dalam politik Islam adalah identitas yang berbeda dan komitmen dalam pergerakan politik Islam yang berorientasi pada norma politik dan hukum Islam (Hefner, 2000; dan Salvatore, 2007). Politik Islam sering ditafsirkan secara monolitik, dengan analisis sekuler sebagai analisis fenomenal yang berbeda dengan politik berdasarkan ideologi sekuler. Dalam pandangan modern, politik Islam merupakan kombinasi pandangan yang terintegrasi antara Islam dan sekuler. Secara lebih luas bahwa politik Islam di Amerika Serikat dan Eropa dipahami sebagai kerangka kerja politik yang interpretatif dan evaluatif berdasarkan budaya dan agama yang ada didalam Islam itu sendiri (Hurd, 2007).

Uraian di atas sama dengan pandangan dari Aristoteles dan Plato. Kedua ilmuwan tersebut memiliki pandangan tentang politik yang berdasarkan pada moral dalam menentukan masalah. Kebijakan dalam suatu negara harus berpijak pada keadaan dan kewarganegaraan yang baik serta moral yang sempurna. Dalam ilmu politik, Aristoteles memiliki pandangan moral yang cukup tinggi. Aristoteles tidak memandang pentingnya struktur politik. Dia berpandangan pada moral politik seorang pemimpin. Sayangnya, pandangan politik Aristoteles ini banyak diabaikan pada masa kekinian. Politik pada akhir-akhir ini lebih menekankan pada mendapatkan posisi kekuasaan daripada moral kekuasaan (*cf* Aristotle, 1981; Price, 1997; Craig, 2002; dan Thaib, 2012).

Untuk memahami tentang politik Islam, kita juga dapat mengutip bagaimana khalifah Abasiyah dapat mengambil posisi dan memiliki pandangan yang reformis serta dapat memberikan keadilan pada masa-masa awal kekuasaannya (Watt, 1987; dan as-Suyuthi, 2005). Ada juga buku politik Islam yang ditulis oleh al-Mawardi. Dia memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Dia menjadi terkenal berkat karyanya, yaitu sebuah buku pegangan dalam bidang politik, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wal Wilayat ad-Diniya (the Ordinance of Government and Religious Positions)*. Buku tersebut menjadi referensi yang standar bagi Islam politik, terutama orang-orang bermazhab Sunni. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi sendiri memiliki profesi sebagai ahli hukum dan seorang hakim. Dia sebagai trainer di sekolah yang bermazhab fiqh Syafi'i. Dia

juga mengajar pemikiran semua mazhab yang ada (Madjid ed., 1985; Al-Mawardi, 2000; dan Mansor, 2015).

Jabatan prestisius yang pernah diembankan adalah *Qadi al-Qudat* di Ustawa dan Bagdad. Dia menerima gelar kehormatan sebagai *Aqda al-Qudat (the Best Judge of Judges)* pada masa khalifah al-Qaim. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi memberikan gambaran bahwa dia termasuk seorang yang memiliki keahlian sebagai filosof, ahli teori politik, analisis sosial, ahli mediasi, seorang diplomat yang ulung, dan penasihat politik pada masa dua khalifah, yaitu Abasiyah dan Qadir Billah (Al-Mawardi, 2000; dan Mansor, 2015).

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 364 H (Hijriyah) atau 974 M (Masehi). Selanjutnya, dia menjadi sarjana Muslim yang diperhitungkan di dunia Islam. Saudara-saudara dia sebagai seorang bisnis. Di Basrah, dia belajar hukum Islam di sekolah yang bernama Abu Qasil al-Saimari. Selanjutnya, dia melanjutkan belajar ke Bagdad di bawah pengawasan Syekh Abu Hamid dan Abdullah al-Baqi. Dia belajar tentang hukum Islam. Dalam penampilan kehidupan sehari-hari, dia seorang yang sederhana dan sangat sopan (Madjid ed., 1985; Al-Mawardi, 2000; dan Mansor, 2015).

Selain tokoh ilmuwan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, yang menorehkan tulisan politik Islam lainnya adalah Imam al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut merupakan representasi intelektual Muslim yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Islam Sunni. Tokoh-tokoh tersebut telah memformulasikan bahwa sistem pemerintahan yang baik

adalah dengan sistem *khalifah* (al-Ghazali, n.y.; Jindan, 1979; Taimiyah, 1992; dan Al-Mawardi, 2000).

Walaupun demikian, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi sering mengatakan bahwa dia adalah orang yang pertama kali mendefinisikan *khalifah*, terutama bagaimana menjelaskan tugas-tugas seorang *khalifah*, walaupun sistem *khalifah* telah berjalan sebelum dia ada. Sistem *khalifah* dalam pemerintahan merupakan sistem pemeritahan yang legal. Sistem *khalifah* merupakan gambaran sistem kerja dan pengadilan dalam suatu pemerintahan. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi menuliskan pemerintahan sistem *khalifah* ini pada masa *khalifah* Umayyah dan Abasiyah (cf Jindan, 1979; Al-Mawardi, 2000; Liew, 2012; dan Mansor, 2015).

*Al-Ahkam as-Sulthaniyah wal Wilayat ad-Diniya* merupakan buku Islam dan politik yang mempertimbangkan hukum-hukum Islam yang diimplementasikan dalam pemerintahan (Al-Mawardi, 2000). Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi merupakan seorang sarjana Muslim pertama yang menulis hukum Islam dan dikaitkan dengan tata-kelola pemerintahan. Pada masa itu banyak opini bahwa tulisan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi merupakan hasil riset dari khalifah Al-Qaim. Sejak itu, buku *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wal Wilayat ad-Diniya* menjadi referensi yang standar bagi kaum Islam Sunni (Jindan, 1979; Al-Mawardi, 2000; dan Mansor, 2015).

Dalam prakatanya, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi tidak bermaksud untuk menjelaskan secara detail tentang hukum Islam dan etika, tetapi merupakan komponen-komponen

struktur politik. Dalam prakata itu, dia menuliskan bahwa hukum yang ada dalam pemerintahan sebaiknya lebih bersifat aplikatif dan otoritatif. Masalahnya, dalam tata-kelola pemerintahan itu, ada politik dan manajemen. Kondisi yang demikian, menurut Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, diharapkan bahwa hukum Islam yang ada dalam pemerintahan Islam tidak bercampur dengan hukum yang lain (Al-Mawardi, 2000; dan Mansor, 2015).

Pemikiran politik Islam, selain dari Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, juga ada dari Imam al-Ghazali. Dia merupakan anak laki-laki yang menempuh jalan Sufi. Dia berasal dari kota Tus di provinsi Khurasan, Persia. Ketika berumur 23 tahun, Imam al-Ghazali menjadi mahasiswa dari sekolah Islam yang terkenal, yaitu Al-Juwaini. Dia menjadi terkenal ketika diundang menjadi pengajar di sekolah Al-Juwaini. Pada masa pemerintahan Saljuk Nizam al-Mulk, Imam al-Ghazali menjabat di pengadilan sipil (al-Ghazali, n.y.; al-Uzman, n.y.; dan Ma'afi, 2009).

Sebagaimana Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam al-Ghazali juga memiliki pemikiran politik Islam. Dalam pemikiran politik Islam, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa untuk duduk di kursi pemerintahan hendaknya menjauhkan diri dari perang fitnah atau kampanye hitam (*black campaign*) dan dengan kekerasan. Dia meredefinisi hubungan antara *khalifah* dan sultan. Pandangan tersebut membuat Imam al-Ghazali menerima ancaman dari *khalifah* Ismaili Fatimi. Pandangan Imam al-Ghazali tentang politik Islam adalah bahwa *khalifah* itu merupakan cara kerja dalam pemerintahan. Karya tersebut dia



tulis dalam kitab yang berjudul *Fadaih al-Batiniya wa Fadail al-Muztahiriya* (dalam Ma'afi, 2009; dan Liew, 2012).<sup>1</sup>

Pemikiran politik Islam yang lain adalah pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Dia lahir pada tahun 1328 M di Harran. Ibnu Taimiyah mengalami hidup pada masa-masa modern Turki, setelah itu dia tinggal sebentar di Bagdad. Ketika menginjak umur 10 tahun, dia dengan saudaranya pindah ke Damaskus. Ibnu Taimiyah belajar ilmu agama Islam dan *Al-Hadist*. Dia adalah seorang mahasiswa pada lembaga pendidikan yang bermazhab Hambali. Pendapat Ibnu Taimiyah yang keras selalu berdasarkan kepada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist* atau tradisi Nabi, dan *Ijtihad* (Madjid ed., 1985; dan Taimiyah, 1992).

Setelah beberapa tahun berkarya, pada tahun 1282 M, ayahnya meninggal dunia. Ibnu Taimiyah juga sukses meraih gelar akademik sebagai Profesor dalam bidang hukum. Pada saat itu juga, dia menulis kekacauan Islam di dunia. Dia menyaksikan sendiri bahwa umat Islam di dunia Timur telah menjadi korban invasi dari bangsa Tartar atau Mongol. Ibnu Taimiyah tinggal sendirian di Syiria dan menyaksikan peperangan antara bangsa Mamluk dan Tartar itu (Madjid ed., 1985; dan Taimiyah, 1992).

Pada masa itu, kepemimpinan Islam di bawah *khalifah*. Dalam tulisannya, Ibnu Taimiyah mengkritik sistem pemerintahan Islam dengan *khalifah*. Dia menulis pandangannya dalam pemerintahan, yang berjudul *Al-Siyasa al-Shariyya*, yang dikonstruksi hampir sama dengan pemikiran Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi.

<sup>1</sup>Lihat juga, misalnya, "Karya-karya Imam Al-Ghazali". Tersedia secara online di: <http://sejarahislarab.blogspot.co.id/2015/02/karya-karya-imam-al-ghazali.html> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan Islam, dalam bekerja, harus dengan standar moral dan hukum Islam (*cf* Taimiyah, 1992; Al-Mawardi, 2000; dan Liew, 2012).

Tiga tokoh pemikiran politik Islam di atas, baik Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam al-Ghazali ataupun Ibnu Taimiyah, merupakan kekayaan khazanah keilmuan dalam Islam. Apabila ditelisik secara mendalam bahwa tata-kelola negara dari pemikir-pemikir Islam tersebut berkeinginan untuk berdasarkan pada hukum Islam (al-Ghazali, n.y.; al-Usman, n.y.; Taimiyah, 1992; Al-Mawardi, 2000; Ma'afi, 2009; dan Liew, 2012).

Permasalahannya adalah apakah hukum Islam yang aplikatif, sebagai pemahaman setiap orang, dapat disatukan dalam satu pemikiran? Perdebatan antara pemikiran politik Islam dan kenyataan kemajemukan warga masyarakat dalam negara bersangkutan, terkadang menjadi permasalahan yang rumit dan tak berkesudahan apabila dipaksakan bahwa tata-kelola pemerintahan harus berdasarkan semata-mata kepada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* (Madjid ed., 1985; Moten, 1996; dan Saeed, 2006).

**Ketiga, Masalah Psikologi Politik.** Psikologi politik merupakan aplikasi dari penelitian psikologi dan politik sebagai metode, teori, dan data politik (Stone *et al.*, 2014). Politik sebagai ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ilmu terapan, dengan dibarengi hasil penelitian dari ilmu psikologi dalam konteks politik dan sejarah, dengan penggunaan pendekatan yang berbeda. Hal yang utama dalam ilmu psikologi politik adalah berperan dalam dua hal: (1) psikologi politik yang lebih menekankan pada



perilaku yang mengiringi seseorang akibat dari politik; dan (2) psikologi politik yang mengkaji prinsip-prinsip politik dalam pandangan psikologi. Kedua hal tersebut yang membedakan antara ilmu psikologi dan psikologi politik (Lane, 1973; Houghton, 2009; Erisen, 2012; Trust, 2012; dan Stone *et al.*, 2014).

Sejak tahun 1950-an, lapangan psikologi didominasi oleh teori S-R atau Stimulus – Respons dari aliran behaviorisme (Slavin, 2000; dan Nahar, 2016). Pada masa itu, aliran behaviorisme dalam psikologi sangat populer di kalangan ilmuwan. Perspektif ini juga berpengaruh terhadap ilmu politik, yang terintegrasi pada psikologi. Integrasi antara ilmu politik dan psikologi menjadi pengetahuan yang genuin, yaitu psikologi politik (Lane, 1973; Houghton, 2009; Erisen, 2012; Trust, 2012; dan Stone *et al.*, 2014).

Menurut William McGuire (1960), sebagaimana juga dikutip oleh D.P. Houghton (2009), bahwa sejak tahun 1950-an, sumber utama dalam teori psikologi politik adalah situasi keadaan lingkungan untuk direspon oleh masing-masing individu. Stimulus – Respons apa yang terjadi oleh masing-masing individu ataupun kelompok, yang ada dalam masyarakat (McGuire, 1960; dan Houghton, 2009).

Ilmu psikologi politik merupakan kajian politik yang berbasis teori psikologi. Ilmu psikologi politik merupakan ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam wilayah politik. Hal yang demikian, dalam ilmu psikologi politik, tidak dapat dinafikan akan berjalan seiring dan bersama dengan ilmu-ilmu lain, seperti: sosiologi, psikologi, psikiatri, dan komunikasi. Psikologi politik juga

merupakan ilmu yang mengkaji, baik kepemimpinan ataupun perilaku manusia, dalam wilayah politik. Kerja manusia dalam wilayah politik berkaitan dengan psikologi politik, di antaranya adalah cara pengambilan keputusan, pergerakan politik ataupun mobilisasi politik, baik kelompok ataupun individu (Lane, 1973; Houghton, 2009; Erisen, 2012; Trust, 2012; dan Stone *et al.*, 2014).

Melihat uraian di atas, maka dapat dilihat kejadian yang baru saja hangat di Indonesia, yaitu tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Demonstrasi pada tanggal 4 November 2016, ataupun pada tanggal 2 Desember 2016, merupakan unjuk perasaan yang dapat dilihat dari pandangan psikologi politik (Takwin *et al.*, 2012; dan Sagita, 2017). Dari sisi aliran behaviorisme, hal tersebut berpijak pada teori S-R atau Stimulus – Respons. Tumpah-ruahnya berjuta-juta orang di Jakarta, yang menuntut keadilan terlaksananya hukuman bagi seseorang yang telah melakukan penistaan agama, permasalahannya karena hal tersebut berkaitan dengan agama, ataupun *belief*, yang diyakini oleh seseorang (Sagita, 2017).<sup>2</sup>

Penelitian secara empirik menunjukkan bahwa semua agama di dunia akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Artinya bahwa respon penganut agama, baik secara individu ataupun kelompok, akan tergantung pada keadaan dan situasi pada suatu negara. Dasar sosial dan nilai-nilai politik berkaitan dengan persamaan hak, budaya, dan identitas

<sup>2</sup>Lihat juga “Parade Tauhid: Umat Islam Harus Bangun Kekuatan dan Jauhi Perpecahan”. Tersedia secara online di: <http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-83502.html> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Juli 2017].

agama. Keadaan yang demikian dapat dikatakan bahwa semua agama merupakan sumber kekuatan dalam berekspresi. Hal tersebut tergantung pada situasi sosial dan nilai-nilai politik yang ada (Meyer, 2007; dan Raiser, 2013).

Secara umum, orang Islam memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Sama halnya dengan pihak non-Muslim, yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Pendapat yang demikian merupakan anggapan umum yang diyakini oleh setiap pemeluk agama (Mul Kahn *et al.*, 2002).

Berdasarkan survei di negara-negara Tengah Timur dan Utara wilayah Afrika menunjukkan bahwa di Iraq, kebebasan menjalankan agama adalah 48%; di Mesir adalah 46%; di Lebanon, masyarakat Muslim yang hidup di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Sub-Saharan Afrika pada umumnya memiliki pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya adalah 90%; dan di Marocco adalah 88% (Brodd, 2003; dan PRC, 2013).

Tumbuh-suburnya teroris, dengan melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri ataupun penembakan, dapat dikatakan merupakan ketidakpuasan seseorang terhadap situasi dan kondisi yang ada. Mereka mengatasnamakan nilai-nilai agama dalam politik untuk melakukan kekerasan. Walaupun cara-cara tersebut tidak dibenarkan, namun selama masih ada agama di dunia dan bergandengan dengan kehidupan negara, maka perilaku yang demikian tidak akan pernah habis (Brodd, 2003; Meyer, 2007; dan Raiser, 2013). Pada sisi lain, pemahaman negara

yang dikemukakan oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah akan selalu menjadi pegangan bagi umat Islam, yang memahaminya dan menginginkan terwujudnya sistem *khalifah* (al-Ghazali, n.y.; al-Usman, n.y.; Taimiyah, 1992; Al-Mawardi, 2000; Ma'afi, 2009; dan Liew, 2012).

Islam merupakan ideologi politik bagi umat Muslim. Namun, Islam sebagai akidah akan berbeda dengan Islam sebagai sumber spiritual dan sebagai dasar politik. Islam sebagai ideologi politik akan berimbas pada kegiatan di masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, hubungan sosial, dan kebijakan-kebijakan negara yang bersifat internal dan eksternal. Bagi seseorang Muslim yang berpegang pada Islam sebagai ideologi politik, ia akan berpikiran bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan komprehensif untuk dijadikan ideologi politik (KP, 1924; dan Saliyo, 2015).

Memahami ideologi politik juga tidak lepas dari nilai dan sikap. Sikap merupakan sumber perubahan dalam nilai dan ideologi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ideologi berpengaruh terhadap sikap. Secara langsung bahwa fakta-fakta yang ada akan memicu adanya perubahan pada ideologi, nilai, dan sikap. Jika suatu anggota masyarakat menempatkan bahwa nilai sangat penting, maka orang tersebut akan mengubah sikapnya. Ia akan mengubah sikapnya dalam menghadapi fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Keadaan yang demikian akan berpengaruh juga pada ideologi dan nilai, sebagai kekuatan konstruksi seseorang dalam berperilaku (Maio *et al.*, 2003; Houghton, 2009; Erisen, 2012; Trust, 2012; dan Stone *et al.*, 2014).

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa perilaku politik bisa dilihat dari perspektif psikologi, dengan teori Stimulus – Respons yang beraliran behavioristik. Fakta-fakta keadaan pada suatu negara akan direspon oleh seseorang, baik bersifat individu ataupun kelompok. Perilaku seseorang individu ataupun kelompok selalu berdasarkan kepada ideologi, nilai, dan sikap yang dianutnya.

## KESIMPULAN

Hubungan Islam dan politik dapat dijelaskan, baik melalui ilmu politik maupun psikologi politik, dalam perspektif Islam. Hal yang demikian karena politik Islam dapat berintegrasi dengan psikologi politik. Setiap perilaku seseorang, baik secara individu ataupun kelompok, merupakan sikap, nilai, dan ideologi seseorang dan kelompok yang dianutnya.

Untuk mengurangi pemahaman-pemahaman politik garis keras, ataupun radikalisme dalam Islam, maka ilmu psikologi politik dapat digunakan untuk menyelesaikan problema tersebut.<sup>3</sup>

## Referensi

- Abdurrahman, Hafidz. (2004). *Diskursus Islam Politik Spiritual*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Adams, Ian. (2004). *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, terjemahan Ali Noerzaman.
- Adorno, W. Theodor. (1991). *The Culture Industry*:

<sup>3</sup>*Pernyataan*: Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel dengan seluruh isi dan interpretasinya ini adalah karya saya sendiri. Artikel ini bukan hasil plagiat, sebab semua sumber yang saya kutip dalam analisis, tercantum secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, apalagi diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya. Saya siap diberi sanksi akademik, sekiranya apa-apa yang saya nyatakan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- Selected Essays on Mass Culture*. London: Routledge.
- Afala, La Ode Machdani, Muh Tamar & Andi Murfi. (2009). “Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara: Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran” dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.2 [Juli], hlm.145-154. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/99711-ID-pengaruh-agama> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- Afolabi, O.O. (2015). “The Role of Religion in Nigerian Politics and its Sustainability for Political Development” in *Net Journal of Social Science*, Vol.3(2), pp.42-49.
- Ahmad, Haidlor Ali [ed]. (2010). *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press. Tersedia secara online di: [http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDEREBOOK/BUKU\\_DINAMIKA\\_opt.pdf](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDEREBOOK/BUKU_DINAMIKA_opt.pdf) [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- Ahmad, Mumtaz [ed]. (1986). *State, Politics, and Islam*. Indianapolis: American Trust Publications.
- Akbar, Ali Mustofa. (2011). “Politisi Kutu Loncat: Buah Pragmatisme Partai Politik”. Tersedia secara online di: <http://www.voaislam.com/read/citizens-journalism/2011/04/23/14305/politisi-kutu-loncat> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- al-Ghazali, Imam. (n.y.). *Al-Munqiz min al-Dhalal*. Beirut: Al-Maktabah al-Sya’biyah.
- Allport, Gordon. (1961). *Personality*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Al-Mawardi. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, terjemahan Abdul Hayyie.
- Almond, Gabriel A. (1993). “The Study of Political Culture” in Dirk Berg-Schlosse & Ralf Rytlewski [eds]. *Political Culture in Germany*. New York: St. Martin’s Press, Inc.
- al-Usman, Abdul Karim. (n.y.). *Sirah al-Ghazali*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anggoro, Kurnanto. (2007). “Terorisme terhadap Amerika” dalam *Jurnal CSIS*, Vol.36, No.1.
- Arifin, Muhammad Zainal. (2012). “Dialog Antar Agama dalam Pandangan Hans Kung”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Surakarta: FAI UMS [Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. Tersedia secara online juga di: [http://eprints.ums.ac.id/20437/22/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/20437/22/NASKAH_PUBLIKASI.pdf) [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- Aristotle. (1981). “*Politic Book: I-IV*, Translated by Benjamin Jowett”. Available online at: <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html> [accessed in Kudus, Indonesia: December 27, 2016].
- as-Suyuthi, Imam. (2005). *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam: Khulafa’urraSyidin, Bani Umayyah*,

- Bani Abbasiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, terjemahan Samson Rahman.
- Ayubi, Nasih N. (1991). *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Reutledge.
- Azra, Azyumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Black, Antony. (2006). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Brodd, Jefferey. (2003). *World Religions*. Winona, MN: Saint Mary's Press.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Converse, Philip E. (2006). "The Nature of Belief Systems in Mass Publics (1964)" in *Critical Review*, 18, pp.1-3 and 1-74. Available online also at: <http://dx.doi.org/10.1080/08913810608443650> [accessed in Kudus, Indonesia: December 27, 2016].
- Craig, Edward. (2002). *Philosophy: Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage Publication.
- Crone, P. et al. (n.y.). *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought*. USA [United States of America]: Princenton Edu Press.
- Dahl, Robert A. (1984). "Poliarchy, Pluralism, and Scale" in *Scandinavian Political Studies*, Vol.7, No.4 [New Series].
- Denoeux, Guilain. (2002). "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam" in *Middle East Policy*, Vol.IX, No.2 [June]. Available online also at: [http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL/Images/Journal\\_Samples](http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL/Images/Journal_Samples) [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Easton, David. (1965). *A System's Analysis of Political Life*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Erisen, E. (2012). "An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars" in *Perceptions*, Vol.27, No.3, pp.9-28.
- Espósito, John L. (1996). *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas? Menggugat Tesis Huntington*. Bandung: Penerbit Mizan, Terjemahan, edisi revisi.
- Fitria, Vita. (2009). "Konflik Peradaban Samuel P. Huntington: Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?" dalam *HUMANIKA*, Vol.9, No.1 [Maret], hlm.39-52. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/18122-ID-konflik-peradaban-samuel-p-huntington> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Fromm, Erich. (1982). *To Have or To Be?* New York: Bantam Books.
- Gazi. (2013). "Psikologi Sosial Mayoritas-Minoritas: Menguji Pengaruh Identitas Sosial, Orientasi Dominasi Sosial, Persepsi Keterancaman terhadap Dukungan atas Kekerasan". *Penelitian Individual Tidak Diterbitkan*. Jakarta: UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Haikal, Muhammad Husein. (1972). *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Tintamas, terjemahan Ali Audah.
- Hanvitra. (2015). "Muhammad Khatami dan Dialog Antar Peradaban". Tersedia secara online di: <https://www.kompasiana.com/hanvitra/muhammad-khatami-dan-dialog-antar-peradaban> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Haryono, Anton. (2010). "Implementasi Aspek Humaniora dalam Kajian Sejarah" dalam *Arah Reformasi Indonesia: Pendidikan dan Sejarah*, No.39 [Mei]. Tersedia secara online juga di: <https://repository.usd.ac.id/5064/1/261> Implentasi+Aspek+Humaniora [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ISAI [Institut Studi Arus Informasi], terjemahan Ahmad Baso.
- Hiro, Dilip. (1989). *Islamic Fundamentalism*. London: Paladin Grafton.
- Houghton, D.P. (2009). *Political Psychology: Situations, Individuals, and Cases*. New York: Routledge.
- Huntington, Samuel P. (1996). *The Clash of Civilization and Remarking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Hurd, E.S. (2007). "Political Islam and Foreign Policy in Europe and the United States" in *Foreign Policy Analysis*, Vol.3, pp.345-367.
- Inkeles, Alex. (1965). *What is Sociology? An Introduction to the Discipline and Profession*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Jindan, Khalid Ibrahim. (1979). *The Islamic Theory of Government Accoding to Ibn Taymiah*. Washington, D.C.: Georgetown University.
- Jost, J.T. et al. (2007). "Are Needs to Manage Uncertainty and Threat Associated with Political Conservatism or Idiologial Extremity ?" in *PSPB*, Vol.33, No.7, pp.989-1007.
- Jost, J.T., C.M. Federico & J.L. Napier. (2009). "Political Idiology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities" in *Annual Review Psychology*, doi: 10.1146/annurev.psych.60.110707.163600, pp.307-337.
- Kahan, D.M. (2013). "Idiology, Motivated Reasoning, and Cognitive Reflection" in *Judgment and Decision Making*, Vol.8, No.4, pp.407-424.
- "Karya-karya Imam Al-Ghazali". Tersedia secara online di: <http://sejarahislamarab.blogspot.co.id/2015/02/karya-karya-imam-al-ghazali.html> [diakses di



- Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- KP [Khilafah Publications]. (1924). *Political Thought*. London: Glouster Road.
- Kung, Hans. (2000). "Perdamaian Dunia, Agama-agama Dunia, Etika Dunia" dalam Ali Noer Zaman [ed]. *Agama untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lacey, A. & D. Luff. (2009). *Qualitative Analysis Data*. East Midlands: National Institute for Health Research.
- Lane, Max. (2007). *Bangsa yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto*. Jakarta: Reform Institute, Terjemahan.
- Lane, R.E. (1973). *Hand Book of Political Psychology*. London: Jossey Bass Publishers, general editor by Jeanne N. Knutson.
- Lee, Thomas W. et al. (1992). "Commitment Propensity, Organizational Commitment, and Voluntary Turnover: A Longitudinal Study of Organizational Entry Processes" in *Journal of Management*, Vol.18, No.1, pp.15-32.
- Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liew, H.H. (2012). "Writing Away the Caliph, Political, and Religious Legitimacy in Late Medieval Islamic Political Thought". *Unpublished Ph.D. Thesis*. USA [United States of America]: Wesleyan University.
- Ma'afi, Rif'at Husnul. (2009). "Konsep Negara Menurut Al-Ghazali". Tersedia secara online di: <https://artikelilmiah.wordpress.com/2009/01/16/konsep-negara-menurut-al-ghazali/> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Madjid, M. Nurcholish [ed]. (1985). *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maio, G.R. et al. (2003). *Handbook of Social Psychology*. USA [United State of America]: Springer, edited and translated by John Delamater.
- Mannheim, Karl. (1991). *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge, new edition.
- Mansor, W.N.W. (2015). "Abu Hasan al-Mawardi: The First Islamic Political Scientist". *Unpublished Paper*, pp.1-8.
- Mantri, Yaya Mulya. (2012). "Makna Ideologi dari Berbagai Sudut Pandang para Ahli dan Aplikasinya di Indonesia". Tersedia secara online di: <https://www.kompasiana.com/ymulya/makna-ideologi-dari-berbagai-sudut-pandang-para-ahli> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- McGuire, William. (1960). "Cognitive Consistency and Attitude Change" in *Journal of Abnormal and Social Psychology*, No.60, pp.345-353.
- Meyer, T. (2007). *Religion and Politics*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung Dept. for Development Policy Hiroshimastraße.
- Miller, A.H., G.L. Simunons & J.R. Hildreth. (1986). *Group Influence Solidarity and Electoral Outcomes*. Iowa, USA [United States of America]: Departement of Political Science, the University of Iowa.
- Moten, Abdul Rashid. (1996). *Political Science: An Islamic Perspective*. London: Macmillan Publishing.
- Mulkahn, Abdul Munir et al. (2002). *Agama dan Negara: Perspektif Islam, Katholik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*. Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei.
- Mulyana, Dedy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nahar, Novi Irwan. (2016). "Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses Pembelajaran" dalam *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.1 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/94-378-2-PB.pdf> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks, edisi ke-7, terjemahan Edina T. Sofia.
- Oakeshott, Michael. (1939). *The Social and Political Doctrines of Contemporary Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oktaviana, Sabrina. (2016). "Perkembangan Ideologi di Dunia dan di Indonesia". Tersedia secara online di: <https://www.kompasiana.com/priscila/perkembangan-ideologi-di-dunia> [diakses di Kudus, Indonesia: 15 Januari 2017].
- "Parade Tauhid: Umat Islam Harus Bangun Kekuatan dan Jauhi Perpecahan". Tersedia secara online di: <http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-83502.html> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Juli 2017].
- PRC [Pew Research Center]. (2013). *The World's Muslims: Religion, Politics, and Society*. Washington: The Pew Forum on Religion & Public Life.
- Price, A.W. (1997). "Plato: Ethics and Politics" in C.C.W. Taylor [ed]. *History of Philosophy, Volume I: From the Beginning to Plato*. London: Routledge.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2012). "Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Equilibrium*, Volume 5(1), Juni. Tersedia secara online juga di: <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Raiser, K. (2013). *Religion, Power, Politics*. Oikoumene: World Council Churches Publications.
- Rokeach, Milton. (1951). "Toward the Scientific Evaluation of Social Attitudes and Ideologies" in *Journal of Psychology*, 31, pp.97-104.
- Rokeach, Milton. (1968). *Belief, Attitudes, and Values: A Theory of Organization and Change*. San Francisco: Jossey-Bass, Inc.
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge.



- Sagita, Darwis. (2017). "Analisis Isi Berita Pernyataan Kontroversial Gubernur Basuki Cahaya Purnama tentang Isu Penistaan Agama pada Media Online". Tersedia secara online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/321-585-1-PB.pdf> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Juli 2017].
- Saliyo. (2015). "Islamic Motivation" dalam *Proceeding Konsorsium Keilmuan Psikologi PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Salvatore, Dominick. (2007). *International Economics*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, fifth edition.
- Slavin, R.E. (2000). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Massachusetts: Allyn and Bacon
- Stone, J. & S. Menhell. (2005). *Alexis de Tocqueville tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia], terjemahan Yusi A. Pareanom.
- Stone, S. et al. (2014). "Political Psychology" in *Overview*, doi: 10.1002/wcs.1293, pp.1-13.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media & Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Suriasumantri, Jujun S. (2005). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Taimiyah, Ibnu. (1992). *As-Syiasah as-Syar'iyah fi Islah al-Rai' wa al-Rai'yyah*. Bairut, Lubnan: Dar Fikr.
- Tajfel, H. & J.C. Turner. (1986). "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior" in S. Worchel & W.G. Austin [eds]. *Psychology Intergroup Relations*. Illinois: Nelson-Hall, Inc.
- Takwin, Bagus et al. (2012). "Mencermati Cagub dari Psikologi Politik". Tersedia secara online di: <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/25/03543452/Mencermati.Cagub.dari.Psikologi.Politik>. [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Thaib, L. (2012). "Concept of Political Authority in the Islamic Political Thought" in *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Vol.1, Iss.2, pp.2319-2334.
- Trust, M. (2012). "Modern Political Thought in the Context of Evaluationary Psychology" in *Theoretical Papers*, pp.1-30.
- Varma, S.P. (2001). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, terjemahan Tohir Effendi.
- Watt, W. Montgomery. (1987). *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Beunebi Cipta.
- Yanuardy, Dian. (2003). "Civil Society dan Demokratisasi di Indonesia: Studi atas Pemikiran Robert W. Hefner, 1985-2002". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga. Tersedia secara online juga di: <http://digilib.uin-suka.ac.id/9362/1/BAB%20I.%20V.pdf> [diakses di Kudus, Indonesia: 27 Desember 2016].
- Ysseldyk, R., K. Matheson & H. Anisman. (2010). "Religiosity as Identity: Toward an Understanding of Religion from a Social Identity Perspective" in *Personality and Social Psychology Review*, Vol.14, No.1, pp.60-71.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1996). *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].



### **Umat Islam dan Politik di Indonesia**

(Sumber: <http://www.panjimas.com/news>, 15/7/2017)

Hubungan Islam dan politik dapat dijelaskan, baik melalui ilmu politik maupun psikologi politik, dalam perspektif Islam. Hal yang demikian karena politik Islam dapat berintegrasi dengan psikologi politik. Setiap perilaku seseorang, baik secara individu ataupun kelompok, merupakan sikap, nilai, dan ideologi seseorang dan kelompok yang dianutnya.